

POHON KINERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 (RENSTRA 2025 - 2029)

ISU / MASALAH POKOK	Kualitas Lingkungan Hidup yang Masih Rendah										
MASALAH	Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Masih Rendah	Rendahnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masih Rendah	Masih rendahnya tata Kelola persampahan	Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP masih rendah	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang masih tinggi	Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH masih rendah	Kapasitas SDM bidang lingkungan hidup masih rendah	Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup masih rendah	Kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati masih rendah	Belum optimalnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
AKAR MASALAH	Belum maksimalnya pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah kabupaten	Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	Masih kurangnya penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten	Belum maksimalnya pengelolaan sampah	Belum maksimalnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten	Belum optimalnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten Belum optimalnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten	Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang masih rendah Kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang masih rendah	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masih tingginya pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota	Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD 2. Administrasi Keuangan PD 3. Administrasi Umum PD 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
MISI	Meningkatkan Kualitas Lingkungan HidupMeningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan										Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif
TUJUAN	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan										
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)										
SASARAN	Meningkatnya lingkungan hidup yang berkualitas										Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah
INDIKATOR KINERJA SASARAN	Indeks Daya Dukung Daya Tampung										Nilai SAKIP Perangkat Daerah
PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah B3	Program Pengelolaan Persampahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
PENANGGUNG JAWAB	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan		Bidang P enaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup				Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		Sekretariat	

Maumere, 3 November 2025


 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Sikka,
Drs. ADEOBATUS BUANG DA CUNHA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660516 199903 1 006